

### III. Menuju Tata Pemerintahan yang Lebih Baik

## Kebijakan Ekonomi dan Pengelolaan Ekonomi Makro

### Tinjauan Umum

Dukungan Jepang untuk kebijakan ekonomi dan pengelolaan ekonomi makro diberikan dengan mengombinasikan dua cara pendekatan. Pertama, secara cepat dan intensif untuk kepentingan stabilitas ekonomi, yaitu dengan cara membantu menjaga stabilitas neraca pembayaran internasional, dan yang lainnya adalah dengan cara bantuan jangka panjang yang berkelanjutan dengan tujuan utama untuk peningkatan kapasitas yang dilakukan dengan dukungan kerjasama teknik.

Dukungan JICA secara cepat dan intensif untuk stabilisasi ekonomi dilakukan dalam bentuk pinjaman non-proyek, atau yang biasa disebut pinjaman program. Sebagai contoh adalah bantuan yang diberikan pada saat krisis neraca pembayaran internasional yang terjadi tahun 1960-an dan 1970-an, krisis ekonomi yang disebabkan anjloknya harga minyak mentah di dunia di akhir tahun 1980-an, dan awal tahun 1997 krisis ekonomi akibat pengaruh krisis mata uang Asia. Pada akhir tahun 1990-an, bantuan yang diberikan termasuk untuk keperluan jaring pengaman sosial dan pinjaman untuk pengembangan sektor kesehatan dan gizi, dan pertimbangan krisis ekonomi ini besar dampak buruknya terhadap rakyat yang rentan secara ekonomi dan sosial.

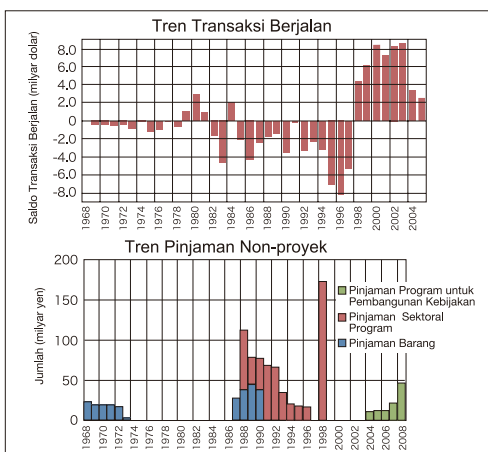
JICA juga memberikan bantuan teknik jangka panjang kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Diantaranya, yang memfokuskan pada analisa ekonomi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Selain itu, pada saat dimulainya krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an, Jepang memberikan kerjasama teknik untuk mendukung kebijakan ekonomi, dengan cara melakukan dialog antara para pembuat kebijakan dan para ahli ekonomi Jepang untuk menghadapi krisis ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, JICA memberikan bantuan keuangan untuk mendukung dan menciptakan iklim investasi (mis. Pengembangan lembaga, pengembangan infrastruktur dll), dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kondisi stabilitas ekonomi. Bantuan ini diberikan oleh JICA sebagai dukungan atas usaha-usaha reformasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa contohnya adalah "Pinjaman Program untuk Pembangunan Kebijakan" dan "Pinjaman Program untuk Pengembangan Reformasi Infrastruktur." Jepang juga membantu pengembangan sumber daya manusia, penataan kelembagaan pada bidang jasa keuangan dan administrasi perpajakan.

### Hasil

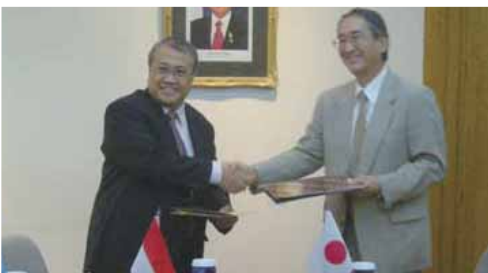
Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, JICA mengombinasikan dua cara pendekatan dalam bantuan; yaitu cepat dan intensif untuk mengatasi masalah neraca pembayaran internasional dan stabilitas fiskal dengan tujuan utama memberikan dampak stabilitas ekonomi, dan melalui dukungan jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembangunan kapasitas dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan-pendekatan ini, maka JICA telah:

- Berkontribusi kepada Indonesia melalui bantuan secara cepat dan intensif untuk perbaikan neraca pembayaran internasional, pada saat krisis ekonomi, yakni ketika kondisi makro ekonomi Indonesia dalam keadaan sangat sulit, selama terjadi krisis neraca pembayaran internasional dan krisis mata uang Asia.
- Berkontribusi untuk peningkatan kemampuan pengelolaan makro ekonomi dengan memberikan kerjasama teknik dari berbagai sudut pandang, khususnya bantuan untuk perumusan perencanaan pertumbuhan ekonomi, dialog kebijakan selama krisis, reformasi institusi untuk menghadapi tekanan di bidang keuangan, pasar



### Skema Pinjaman Program untuk Pembangunan Kebijakan (dimulai tahun 2005)

Adalah skema pembiayaan umum yang memberikan dukungan finansial berdasarkan pada pencapaian "pelaksanaan kebijakan" yang ditetapkan atas dasar pembicaraan dengan pihak Indonesia. Hal-hal yang ditetapkan sebagai indikator dalam pencapaian "pelaksanaan kebijakan" pada Pinjaman Program untuk Pembangunan Kebijakan ke-6, antara lain: meninjau peraturan investasi, persiapan terhadap penyatuan penanganan prosedur impor/ekspor, perumusan penyederhanaan dokumen perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan. Skema ini dapat dianggap sebagai bantuan yang sesuai dengan Komitmen Jakarta, yang menuju pelaksanaan terpadu atas kepemilikan (*ownership*) dan bantuan pendanaan (*aid funds*).



modal, perpajakan, dsb.: dan pengembangan sumber daya manusia.

- Mendukung usaha-usaha reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan memberikan bantuan terhadap usaha pemerintah Indonesia yang menekankan kepemilikan institusi dan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, dan secara simultan memberikan bantuan pembiayaan dan teknik.

## Tata Kelola Pemerintahan

### Tinjauan Umum

Kerjasama dalam hal pemerintahan adalah bidang yang relatif baru bagi JICA Indonesia. Di bawah rezim Soeharto yang berlangsung selama 30 tahun sampai tahun 1998, bantuan JICA untuk penataan statistik (antara lain berupa bantuan komputer untuk Biro Pusat Statistik) adalah salah satu contohnya. Penataan statistik termasuk perbaikan sensus penduduk, merupakan satu fondasi penting bagi negara, yang juga menjadi dasar bagi demokrasi di akhir 1990-an.

Sejak tahun 1998, kerjasama JICA dalam bidang ini telah meraih momentum seiring dengan meningkatnya demokrasi dan desentralisasi di Indonesia. Sebagai dukungan untuk menuju demokratisasi, JICA memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pemilu, reformasi sistem peradilan (termasuk reformasi sistem penyelesaian masalah dan rekonsiliasi serta pembentukan skema training untuk mediator) dan juga reformasi kepolisian. Dukungan JICA untuk reformasi kepolisian berawal dari terpisahnya POLRI dari kesatuan TNI menjadi institusi yang mandiri pada tahun 1999 yang merupakan langkah maju untuk reformasi kepolisian, sebagai gerakan demokrasi dan juga pengalihan dari fungsi pengamanan negara menjadi fungsi untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Sejak tahun 2001, JICA bekerjasama dengan POLRI untuk membangun model untuk Polisi yang baru. Aktivitas yang dilakukan dalam hal ini membantu Polisi untuk "meraih kepercayaan mendasar dari masyarakat." Salah satu kegiatannya berupa mengenalkan sistem *koban* (pos polisi) versi Indonesia (selanjutnya disebut Balai Kemiraan Polisi dan Masyarakat atau BKPM) sebagai model dari *koban* Jepang. Aktivitas lain adalah memperkenalkan mekanisme polisi yang bertanggung jawab atas keamanan warga di wilayah hukumnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengakui efektivitas kegiatan kepolisian masyarakat dengan BKPM sebagai intinya dan kesesuaiannya dengan masyarakat Indonesia. Saat ini BKPM telah tersebar luas di seluruh Indonesia dengan dasar polisi berbasis masyarakat. Pada saat yang bersamaan, model baru perpolisian yang dibentuk dengan bantuan dari JICA telah menjadi sebuah kebijakan dalam bentuk POLMAS (Kepolisian Masyarakat versi Indonesia) yang bertujuan "membangkitkan kemiripan petugas polisi dengan masyarakat" dan "memecahkan berbagai masalah sosial yang timbul dalam masyarakat."

Sebagai bantuan untuk desentralisasi, pada tiap sektor dilakukan proyek dengan tujuan penguatan fungsi yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat, selain itu pemerintah Jepang juga telah bekerja sama meningkatkan kapasitas Dewan Perwakilan Daerah dan aparat pemerintah daerah. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bagi para aparat pemerintah di daerah, kerjasama JICA ditujukan untuk mengembangkan kemampuan lembaga pelatihan di tingkat pusat dan daerah dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program pelatihan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebagai hasil dari kerjasama itu, dukungan kelembagaan untuk perubahan yang dibawa berkat kerjasama dengan pemerintah Jepang telah diberikan melalui, misalnya ditetapkannya "Pedoman Manajemen Pelatihan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2007)" oleh Kementerian Dalam Negeri.

### Hasil

Seiring dengan langkah besar Indonesia menuju demokrasi dan desentralisasi, bantuan yang diberikan JICA tidak hanya menyampaikan pengalaman Jepang dan menerapkannya di Indonesia begitu saja, tetapi dengan cara membangun mekanisme yang disesuaikan dengan Indonesia dan pengembangan sumber daya manusia berkolaborasi dengan personil pendamping dari Indonesia. Dengan demikian hasilnya adalah:

- Demokratisasi polisi dan penciptaan mekanisme atau model khusus untuk pemerintah daerah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di Indonesia dalam sebuah paradigma baru demokrasi dan desentralisasi.
- Pada saat yang sama, JICA memberikan kontribusi pada pengembangan sumber daya manusia sehingga mampu untuk mengelola mekanisme baru tersebut.



BKPM merupakan adopsi dan pos polisi Jepang ("koban")



Alih kemampuan dan pengetahuan teknik identifikasi

### Jalan menuju demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia

Dengan semangat Indonesia telah mempromosikan demokratisasi dan desentralisasi sejak mundurnya President Soeharto pada bulan Mei 1998. Demokratisasi terus bergerak bebas, partai-partai politik tumbuh subur, sistem minimal persentase pencapaian suara untuk mengikuti pemilu berikutnya dilakukan, perombakan DPR secara besar-besaran, dan dilaksanakannya pemilihan presiden dan pemimpin daerah secara langsung. Indonesia juga memisahkan institusi polisi dari kesatuan militer dan secara jelas membentuk institusi polisi sebagai abdi masyarakat. Indonesia juga menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama karena ini merupakan masalah yang telah berlangsung lama.

Untuk desentralisasi, Indonesia sedang berjuang keras untuk melaksanakan proyek-proyek yang memenuhi kebutuhan daerah dengan lebih baik. Termasuk pengalokasian dana belanja kepada pemerintah daerah, juga termasuk mengalihkan fungsi pemerintah pusat kepada kontrol pemerintah daerah. Dengan demikian penguatan kapabilitas/kemampuan dari pemerintah daerah yang belum banyak memiliki pengalaman dalam mengambil inisiatif dalam membuat perencanaan dan melaksanakan proyek merupakan hal yang sangat dibutuhkan.



Seminar untuk peningkatan pelayanan pemerintah berdasarkan konsep tata pemerintahan yang baik